

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022



**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BULELENG**





## URUSAN KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka menyiapkan sumberdaya yang tangguh dan mampu bersaing dalam persaingan global. Pembangunan pada urusan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatannya dengan memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada.

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11). Hingga tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng telah memiliki dua puluh dua Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dimana empat diantaranya merupakan Puskesmas rawat inap, serta satu unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat, satu unit Instalasi Farmasi, 73 Puskesmas Pembantu, dan 20 Puskesmas Keliling. Disamping itu Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng juga memiliki dua buah rumah sakit sebagai unit pelaksana teknis yakni Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia dan Rumah Sakit Giri Emas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.



2. Pelaksanaan upaya kesehatan yang meliputi peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) di bidang kesehatan.
3. Pembinaan upaya kesehatan dasar beserta rujukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan.
5. Koordinasi yang merupakan segala untuk mengadakan hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas .
6. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok.
7. Pengelolaan urusan Tata Usaha

Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng disusun sebagai jalinan strategi dan tahapan-tahapan pencapaian tujuan Dinas Kesehatan. Tujuan Dinas Kesehatan diarahkan dalam rangka pencapaian visi misi Bupati Buleleng. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng perlu memastikan bahwa terdapat sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai arah dan prioritas strategis dalam lima tahun mendatang. Sasaran strategis tersebut membentuk suatu hipotesis jalinan sebab-akibat untuk mewujudkan tercapainya Tujuan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng merupakan adaptasi dari misi dan sasaran Kepala Daerah Kabupaten Buleleng yang dituangkan kedalam RPJMD. Tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan kesehatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegritas” dengan sasaran yaitu “Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan”



Indikator kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng secara keseluruhan. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng adalah 1) Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi, 2) Angka Kematian Ibu, 3) Angka Kematian Bayi, 4) Persentase Balita Gizi Buruk, 5) Angka Usia Harapan Hidup.

Untuk mencapai target indikator kinerja utama tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam tahun anggaran 2022 mengupayakan 4 program utama dengan 10 kegiatan, serta 1 program penunjang dengan 7 kegiatan.

### **Penjabaran Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Jumlah Program Kegiatan Sub Kegiatan</b>			<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>
(1)	(2)			(3)
1	Induk	Program	5	Rp. 240.228.774.183,00
		Kegiatan	17	
		Sub Kegiatan	58	
2	Perubahan	Program	5	Rp. 268.801.376.673,00
		Kegiatan	17	
		Sub Kegiatan	58	

#### **A. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan**



Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, alokasi anggaran sebesar Rp. 268.801.376.673,00 dengan realisasi sebesar Rp. 225.343.439.252,63 atau 83,83%. Dengan capaian keluaran (*output*) mencapai 99,87% yang dijabarkan melalui 5 Program, 17 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

**a) Program Penunjang**

Program Penunjang pada Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan, dan 17 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 82.159.445.564,00, realisasi anggaran sebesar Rp 79.514.700.366,00 atau 96,78%. Dengan capaian 100%, yang dijabarkan sebagai berikut:

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp82.159.445.564 realisasi keuangan sebesar Rp79.514.700.366 atau 96,78%, dengan capaian 100%.**

Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

**1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp30.820.000, realisasi keuangan sebesar Rp30.820.000 atau 100%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator keberhasilan Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran tersusun tepat waktu, alokasi anggaran sebesar Rp11.500.000,00 realisasi Rp11.500.000,00 atau



100%. Dengan target 4 dokumen dengan realisasi (*output*) 4 dokumen atau 100%.

- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator keberhasilan jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah minimal B alokasi anggaran sebesar Rp19.320.000,00 realisasi Rp19.320.000,00 atau 100%. Dengan target 1 dokumen dengan realisasi (*output*) 1 dokumen atau 100%.

**1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp73.569.334.521,00 realisasi keuangan sebesar Rp71.124.896.845,00, atau 96,68%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator keberhasilan jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan alokasi anggaran sebesar Rp73.495.639.196,00, realisasi Rp71.052.175.155 atau 96,68 %. Dengan target 830 orang serta realisasi (*output*) 830 orang atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator keberhasilan jumlah jenis SPJ UP, GU dan LS tertangani tepat waktu alokasi anggaran sebesar Rp68.695.325,00 realisasi Rp67.721.690,00 atau 98,58%. Dengan target 12 jenis serta realisasi (*output*) 12 jenis atau 100%.



- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator keberhasilan jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun tepat waktu alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000,00 realisasi Rp5.000.000,00 atau 100%. Dengan target 25 dokumen serta realisasi (*output*) 25 dokumen atau 100%.

**1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.663.200,00 realisasi keuangan sebesar Rp2.520.000,00 atau 94,62%, dengan capaian 100,00%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator keberhasilan Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan Rekomendasi Perbaikan dan Jumlah Dokumen Pendataan aset dan Inventaris Aset Barang Milik Daerah alokasi anggaran sebesar Rp2.663.200,00, realisasi Rp2.520.000,00 atau 94,62%. Dengan target masing-masing 12 dokumen dan 25 dokumen serta realisasi (*output*) masing-masing 12 dokumen dan 25 dokumen atau 100%.

**1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.518.568.350,00 realisasi keuangan sebesar Rp7.403.434.640,00 atau 98,47%, dengan capaian 100%.**



Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator keberhasilan Jumlah kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal alokasi anggaran sebesar Rp7.518.568.350,00, realisasi Rp7.403.434.640,00 atau 98,47%. Dengan target 812 orang serta realisasi (*output*) 812 orang atau 100%.

**1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp514.087.822,00 realisasi keuangan sebesar Rp477.264.091,00 atau 92,84%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 5 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator keberhasilan Jumlah kebutuhan saran listrik dan penerangan alokasi anggaran sebesar Rp 6.004.878,00, realisasi Rp 4.827.612,00 atau 80,39%. Dengan target 5 jenis serta realisasi (*output*) 5 jenis atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator keberhasilan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor alokasi anggaran sebesar Rp291.912.727,00, realisasi Rp281.119.364,00 atau 96,30%. Dengan target 4 jenis serta realisasi (*output*) 4 jenis atau 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator keberhasilan Jumlah Penyelenggaraan Upacara alokasi anggaran sebesar Rp





62.103.250,00, realisasi Rp54.457.000,00 atau 87,69%. Dengan target 47 kali serta realisasi (*output*) 47 kali atau 100%.

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator keberhasilan Jumlah jenis kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi anggaran sebesar Rp50.774.208,00 realisasi Rp44.873.065,00 atau 88,38%. Dengan target 47 jenis serta realisasi (*output*) 47 jenis atau 100%.
- e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator keberhasilan Jumlah Laporan Hasil Rapat dan Konsultasi alokasi anggaran sebesar Rp103.292.759,00, realisasi Rp91.987.050,00 atau 89,05%. Dengan target 30 laporan serta realisasi (*output*) 30 laporan atau 100%.

**1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp288.521.671,00 realisasi keuangan sebesar Rp242.445.632,00 atau 84,03%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator keberhasilan Jumlah surat masuk dan surat keluar tertangani alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000,00, realisasi Rp2.500.000,00 atau 100%. Dengan target 7500 lembar serta realisasi (*output*) 12.801 lembar atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator keberhasilan



Jumlah pemenuhan kebutuhan telepon, air dan listrik alokasi anggaran sebesar Rp92.000.000,00, realisasi Rp72.380.768,00 atau 78,67%. Dengan target 36 rekening serta realisasi (*output*) 36 rekening atau 100%.

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator keberhasilan jumlah jenis bahan/alat kebersihan, jumlah jenis kebutuhan ATK, dan jumlah peralatan kerja dalam kondisi baik alokasi anggaran sebesar Rp194.021.671,00 realisasi Rp167.564.864,00 atau 86,36%. Dengan target masing-masing indikator yakni 17 unit, 131 jenis, dan 53 unit serta realisasi (*output*) masing-masing 17 unit, 131 jenis, dan 53 unit atau 100%.

**1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp235.450.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp233.319.158,00 atau 99,09%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional lapangan dengan indikator keberhasilan Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan layak operasi alokasi anggaran sebesar Rp185.050.000,00, realisasi Rp183.860.158 atau 99,36%. Dengan target 30 unit serta realisasi (*output*) 30 unit atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator



keberhasilan Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik alokasi anggaran sebesar Rp50.400.000,00, realisasi Rp49.459.000 atau 98,13%. Dengan target 1 unit serta realisasi (*output*) 1 unit atau 100%.

#### **b) Program Utama**

Sedangkan pada Program Utama pada Urusan Kesehatan terdiri terdiri dari 4 Program, 10 Kegiatan, dan 41 Sub Kegiatan yang digunakan oleh Unit Utama Dinas Kesehatan, 24 UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kab. Buleleng, dengan alokasi anggaran sebesar Rp186.641.931.109,00, realisasi anggaran sebesar Rp145.828.738.886,63 atau 78,13%, dengan Capaian 99,33%, yang dijabarkan sebagai berikut :

**1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp185.948.485.228,00 realisasi keuangan sebesar Rp145.522.261.976,63 atau 78,26%, dengan capaian 100%.** Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut:

**1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 10.278.095.770,00 realisasi keuangan sebesar Rp 9.307.511.397,00 atau 90,56%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator keberhasilan Jumlah alat kesehatan yang diadakan dan Tersedianya alat kesehatan/ alat penunjang medik pelayanan kesehatan dasar, alokasi anggaran sebesar



Rp1.727.618.028,00, realisasi Rp1.409.852.648,00 atau 81,61%. Dengan target masing-masing indikator yakni 370 unit dan 3 unit serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 370 unit atau 100% dan 3 unit atau 100%.

- b) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin dengan indikator keberhasilan Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit dengan ketersediaan obat sesuai dengan standar, Jumlah Rumah Sakit Dengan Ketersediaan Obat Sesuai dengan Standar dan, dan Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang mendapat distribusi obat tepat waktu dan diterima dalam kondisi baik, alokasi anggaran sebesar Rp6.630.428.406,00 realisasi Rp6.252.900.839 atau 94,31%. Dengan target masing-masing indikator yakni 22 unit, 2 RS, dan 22 fasyankes serta realisasi (*output*) masing –masing indikator yakni 22 unit, 2 RS, dan 22 fasyankes atau 100%.
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan indikator keberhasilan jumlah Rumah Sakit Dengan Ketersediaan Bahan Habis Pakai Sesuai Dengan Standar alokasi anggaran sebesar Rp1.681.462.336,00 realisasi Rp 1.559.883.010 atau 92,77%. Dengan target 2 rumah sakit serta realisasi (*output*) 2 rumah sakit atau 100%.
- d) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan indikator keberhasilan Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas alokasi

anggaran sebesar Rp238.587.000,00, realisasi Rp84.874.900,00 atau 35,57%. Dengan target 22 paket serta realisasi (*output*) 22 paket atau 100%.

**1.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp175.582.281.852,00 realisasi keuangan sebesar Rp136.134.331.579,63 atau 77,53%, dengan capaian 99,29%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 28 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan indikator keberhasilan Jumlah Dokumen Monitoring and Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan program/kegiatan, Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani, dan Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, alokasi anggaran sebesar Rp3.235.286.449,00, realisasi Rp708.630.000,00 atau 21,90%. Dengan target masing-masing indikator yakni 20 dokumen, 2.200 ibu hamil resiko tinggi, dan 10.991 ibu hamil serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 20 dokumen atau 100%, 2.925 ibu hamil resiko tinggi atau 100%, dan 9.734 ibu hamil atau 88,56%.
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan indikator keberhasilan jumlah pelayanan nifas sesuai standar, jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dan jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar,



alokasi anggaran sebesar Rp1.605.629.980,00 realisasi Rp45.750.000,00 atau 2,85%. Dengan target masing-masing indikator yakni 10.498 ibu nifas, 10.498 ibu bersalin, dan 9.384 ibu bersalin serta realisasi masing-masing indikator (*output*) yakni 9.963 ibu nifas atau 94,90%, 10.046 ibu bersalin atau 95,69%, dan 8.672 ibu bersalin atau 92,41%.

- c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan indikator keberhasilan Jumlah komplikasi neonatal yang ditangani, Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi, dan Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, alokasi anggaran sebesar Rp1.798.114.437,00, realisasi Rp86.650.000,00 atau 4,82%. Dengan target masing-masing indikator yakni 1.500 neonatal, 9.998 bayi, dan 9.696 bayi baru lahir serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 1.113 neonatal atau 74,20%, 9.982 bayi atau 99,84%, dan 9.028 bayi baru lahir atau 93,11 %.
- d) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan indikator keberhasilan Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dan Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, alokasi anggaran sebesar Rp4.197.477.948,00, realisasi Rp714.135.000,00 atau 17,01%. Dengan target masing-masing indikator yakni 38.552 balita dan 38.552 balita serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 40.780 balita atau 100% dan 37.311 balita atau 96,78%.



- e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dengan indikator keberhasilan Jumlah remaja yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dan Jumlah usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, alokasi anggaran sebesar Rp1.911.984.708,00, realisasi Rp183.245.000,00 atau 9,58%. Dengan target masing-masing indikator yakni 109.341 remaja dan 108.139 orang serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 105.102 remaja atau 96,12% dan 88.345 orang atau 81,70%.
- f) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dengan indikator keberhasilan Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan; alokasi anggaran sebesar Rp907.214.531,00, realisasi Rp239.500.000,00 atau 26,40%. Dengan target 357.137 orang serta realisasi (*output*) 217.652 orang atau 60,94%.
- g) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut indikator keberhasilan Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas (usia lanjut) yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dan Jumlah usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; alokasi anggaran sebesar Rp267.445.048,00 realisasi Rp116.670.000,00 atau 43,62%. Dengan target masing-masing indikator yakni 95.498 orang dan 24.699 orang serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 88.417 orang atau 92,59% dan 16.904 orang atau 68,44%.



- h) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan indikator Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan dan Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, alokasi anggaran sebesar Rp154.584.460,00 realisasi Rp37.250.000,00 atau 24,10%. Dengan target masing-masing indikator yakni 44.053 orang dan 28.101 orang serta realisasi (*output*) masing masing indikator yakni 34.219 orang atau 77,68% dan 21.102 orang atau 75,09%.
- i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus dengan indikator Jumlah penderita diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan dan Jumlah penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, alokasi anggaran sebesar Rp158.394.460,00 realisasi Rp20.500.000,00 atau 12,94%. Dengan target masing-masing indikator yakni 8.561 orang dan 5.725 orang serta realisasi (*output*) maisng-masing indikator yakni 9.180 orang atau 100% dan 4.566 orang atau 79,76%.
- j) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dengan indikator Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan dan Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, alokasi anggaran sebesar Rp353.659.460,00, realisasi Rp47.100.000,00 atau 13,32%. Dengan target masing-masing indikator yakni 676 orang dan 713 orang serta realisasi (*output*) masing-





masing indikator yakni 715 orang atau 100% dan 733 orang atau 100%.

- k) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan indikator keberhasilan yakni Jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, Jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS, Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat pelayanan Kesehatan, Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, dan Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; alokasi anggaran sebesar Rp 272.784.460,00, realisasi Rp41.865.000,00 atau 15,35%. Dengan target dari masing masing indikator yakni 528 orang, 1.639 orang, 8.853 orang, 1.639 orang, dan 7.316 orang serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 509 orang atau 96,40%, 838 orang atau 51,13%, 5.829 orang atau 65,8%, 838 orang atau 51,13%, dan 4.710 orang atau 64,38%.
- l) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV dengan indikator Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan dan Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, alokasi anggaran sebesar Rp162.151.000,00 realisasi Rp47.950.000,00 atau 29,57%. Dengan target masing-masing indikator yakni 11.925 orang dan 9.374 orang serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 12.708 orang atau 100% dan 9.184 orang atau 97,97%.



- m) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan indikator jumlah jenis KLB yang ditangani < dari 18 Jam dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar, alokasi anggaran sebesar Rp909.605.835,00 realisasi Rp76.318.800,00 atau 8,39%. Dengan target masing-masing indikator yakni 6 jenis dan 212 dokumen serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 5 jenis atau 83,33% dan 116 dokumen atau 54,72%.
- n) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan indikator yakni Jumlah anak 5-59 bulan mendapat Vitamin A, Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat makanan pendamping ASI, Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan, Jumlah balita gizi kurang, Jumlah Balita KEP Mendapat Perawatan, Jumlah Balita usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif, Jumlah bumil KEK ditangani sesuai standar, Jumlah bumil mendapat Fe 90 tablet, dan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp953.486.000,00, realisasi Rp478.777.105,00 atau 50,21%. Dengan target masing-masing indikator yakni 38.941 orang, 16 orang, 60 kasus, 50 kasus, 88 balita, 586 orang, 728 bumil KEK (ibu hamil kurang energi kronis), 9.232 ibu hamil, dan 206 dokumen serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 44.396 orang atau 100%, 16 orang atau 100%, 52 kasus atau 86,67%, 598 kasus atau 100%, 410 balita atau



100%, 5.073 orang atau 100%, 479 bumil KEK atau 65,80%, 9.173 ibu hamil atau 99,36%, dan 138 dokumen atau 66,99%.

- o) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan indikator Jumlah kelompok/klub olahraga yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan olahraga sesuai standar, Jumlah pos UKK yang dibina dan melaksanakan upaya kesehatan kerja sesuai standar, dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai standar, alokasi anggaran sebesar Rp349.456.000,00, realisasi Rp181.210.000,00 atau 51,85%. Dengan target masing-masing indikator yakni 20 kelompok, 20 pos UKK, dan 127 dokumen, dan 16 kelurahan/desa serta realisasi (*output*) masing-masing indikator 23 kelompok atau 100%, 20 pos UKK atau 100%, 105 dokumen atau 82,68%, 6 kelurahan/desa atau 37,50%.
- p) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan indikator keberhasilan Jumlah desa/kelurahan mendapat pemicuan pilar 1 STBM, Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, dan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, alokasi anggaran sebesar Rp772.832.400,00, realisasi Rp244.915.000,00 atau 31,69%. Dengan target masing-masing indikator yakni 20 desa/kelurahan, 20 dokumen, 324 dokumen, dan 16



kelurahan/desa, serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 20 desa/kelurahan atau 100%, 20 dokumen atau 100%, 109 dokumen atau 33,64%, dan 6 kelurahan/desa atau 37,5%.

- q) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan indikator keberhasilan yakni Jumlah penyebarluasan informasi Kesehatan terbaik, Jumlah model media promosi kesehatan, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, dan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp594.142.719,00, realisasi Rp295.252.500,00 atau 49,69%. Dengan target masing-masing indikator yakni 20 kali, 3 model, 125 dokumen, dan 16 kelurahan/desa serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 20 kali atau 100%, 3 model atau 100%, 86 dokumen atau 68,8%, dan 6 kelurahan/desa atau 37,5%.
- r) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional dengan indikator keberhasilan Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan dan Jumlah penyehat tradisional yang teregistrasi dan dibina, alokasi anggaran sebesar Rp3.250.000,00, realisasi Rp3.250.000,00 atau 100%. Dengan target masing-masing indikator yakni 20 dokumen dan 80 orang serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 20 dokumen atau 100% dan 80 orang atau 100%.
- s) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan indikator keberhasilan Jumlah jenis



penyelidikan epidemiologi <24 jam bagi desa/kelurahan mengalami KLB, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp659.669.688,00, realisasi Rp35.365.000,00 atau 5,36%. Dengan target masing-masing indikator yakni 6 jenis, 195 dokumen, dan 16 kelurahan/desa serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 5 jenis atau 83,33%, 115 dokumen atau 58,97%, dan 6 kelurahan/desa atau 37,50%.

- t) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan indikator keberhasilan Angka toleransi annual parasite inciden (API) < 1, Jumlah balita dan anak sekolah yang mendapat vaksinasi, Jumlah balita pneumonia yang ditangani, Jumlah desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi, Jumlah fooging minimal 2 kali untuk kasus PE positif, Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, Jumlah kasus kejadian malaria, Jumlah kematian akibat malaria, Jumlah penderita diare yang ditangani, Jumlah penderita penyakit DBD yang mendapat pelayanan kesehatan, Jumlah puskesmas yang melaksanakan KIE pencegahan dan pengendalian penyakit menular, Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk, Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, alokasi anggaran sebesar Rp2.126.515.125,00, realisasi Rp605.506.000,00 atau



28,47%. Dengan target masing-masing indikator yakni 0,01 per 100.000 penduduk, 40.735 orang, 1.354 balita, 148 desa/kelurahan, 20 dokumen, 300 fokus, 9.642 orang, 85 kasus, 85 kasus, 7.071 kasus, 1.005 orang, 20 Puskesmas, 2 per 100.000 penduduk, 202 dokumen, dan 16 kelurahan/desa, serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 0,01 per 100.000 penduduk atau 100%, 45.649 orang atau 100%, 271 balita atau 20,01%, 148 desa/kelurahan atau 100%, 16 dokumen atau 80%, 152 fokus atau 50,67%, 10.346 orang atau 100%, 8 kasus atau 100%, 0 kasus atau 100%, 7.232 kasus atau 100%, 875 kasus atau 87,06%, 20 Puskesmas atau 100%, 5,3 per 100.000 penduduk atau -62,78%, 119 dokumen atau 58,91%, dan 6 kelurahan/desa atau 37,50% .

- u) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan indikator keberhasilan Jumlah peserta PBI daerah; alokasi anggaran sebesar Rp71.753.732.450,00, realisasi Rp71.703.097.500,00 atau 99,93%. Dengan target 177.335 peserta serta realisasi (*output*) 177.335 peserta atau 100%.
- v) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional dengan indikator keberhasilan Jumlah spesimen potensial KLB yang dikirim alokasi anggaran sebesar Rp24.000.000,00, realisasi Rp24.000.000,00 atau 100%. Dengan target 52 kali serta realisasi (*output*) 14 kali atau 26,92%.
- w) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan indikator



keberhasilan Jumlah FKTP yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar dan Jumlah puskesmas terakreditasi minimal madya alokasi anggaran sebesar Rp2.007.514.445,00, realisasi Rp555.787.260,00 atau 27,69%. Dengan target masing-masing indikator yakni 20 puskesmas dan 20 puskesmas serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 20 puskesmas atau 100% dan 15 puskesmas atau 75%.

- x) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dengan indikator keberhasilan Jumlah sinyal kewaspadaan yang direspon (Alert SKDR terverifikasi), Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah, dan Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah, alokasi anggaran sebesar Rp10.092.169.600,00, realisasi Rp10.005.079.162,00 atau 99,14%. Dengan target masing-masing indikator yakni 5.000 sinyal, 122 dokumen, 16 kelurahan/desa, serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 2.762 sinyal atau 55,24%, 92 dokumen atau 75,41%, dan 6 kelurahan/desa atau 37,50%.
- y) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan indikator keberhasilan jumlah pasien yang dilayani alokasi anggaran sebesar Rp20.563.340.929,00, realisasi Rp19.325.143.833,00 atau 93,98%. Dengan target 42.000 orang serta realisasi (*output*) 42.000 orang atau 100%.
- z) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas dengan indikator keberhasilan Jumlah kegiatan



lokakarya mini yang dilaksanakan (16 kali), Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan Program Indonesia Sehat, Jumlah kontak komunikasi peserta BPJS, Jumlah kunjungan peserta prolanis, Jumlah rujukan non spesialisik, dan Jumlah upaya kesehatan masyarakat esensial yang mendapatkan pembiayaan, alokasi anggaran sebesar Rp47.941.324.624,00, realisasi Rp30.001.911.869,63 atau 62,58%. Dengan target masing-masing indikator yakni 310 kegiatan, 50.679 KK, 729.934 peserta, 30.453 peserta, 3.785 rujukan, dan 876 kegiatan, serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 291 kegiatan atau 93,87%, 7.149 KK atau 14,11%, 217.043 peserta atau 29,73%, 7.401 peserta atau 24,30%, 351 rujukan atau 9,27%, dan 759 kegiatan atau 86,64%.

- aa) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan indikator keberhasilan Jumlah sampel yang diuji alokasi anggaran sebesar Rp480.747.501,00, realisasi Rp301.972.550,00 atau 62,81%. Dengan target 1.000 sampel serta realisasi (*output*) 1.734 sampel atau 100%.
- bb) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga dengan indikator keberhasilan jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas, Masyarakat yang mendapat pelayanan PIS-PK, alokasi anggaran sebesar Rp1.325.767.595,00, realisasi Rp7.500.000,00 atau 0,57%. Dengan target masing-masing indikator yakni 83 dokumen, 16.384 keluarga, 12 kelurahan/desa,





serta realisasi (*output*) masing masing indikator yakni 78 dokumen atau 93,98%, 4.852 keluarga atau 29,61%, 6 kelurahan/desa atau 50%.

**1.3. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp88.107.606,00 realisasi keuangan sebesar Rp80.419.000,00 atau 91,27%, dengan capaian 75%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan indikator keberhasilan Jumlah FKTL yang terakreditasi minimal madya alokasi anggaran sebesar Rp16.645.606,00, realisasi Rp9.400.000,00 atau 56,47%. Dengan target 2 FKTL serta realisasi (*output*) 1 FKTL atau 50%.
- b) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan indikator keberhasilan Jumlah dokumen laporan pembinaan faskes yang melaksanakan pelayanan matra alokasi anggaran sebesar Rp71.462.000,00, realisasi Rp71.019.000,00 atau 99,38%. Dengan target 28 fasyankes serta realisasi (*output*) 28 fasyankes atau 100%.

**2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp16.410.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp16.410.000,00 atau 100%, dengan capaian 100%.**

Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :



**1.1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp11.010.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp11.010.000,00 atau 100%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan indikator keberhasilan Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat rekomendasi alokasi anggaran sebesar Rp11.010.000,00, realisasi Rp11.010.000,00 atau 100%. Dengan target 500 orang serta realisasi (*output*) 1.464 orang atau 100%.

**1.2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp2.000.000,00 atau 100%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator keberhasilan Jumlah dokumen perencanaan SDMK alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000,00, realisasi Rp2.000.000,00 atau 100%. Dengan target 2 dokumen serta realisasi (*output*) 2 dokumen atau 100%.

**1.3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu**



**Anggaran sebesar Rp3.400.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp3.400.000,00 atau 100%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator keberhasilan Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya alokasi anggaran sebesar Rp3.400.000,00, realisasi keuangan sebesar Rp3.400.000,00 atau 100%. Dengan target 65 orang serta realisasi (*output*) 43 orang atau 66,15%.

**3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp41.780.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp13.360.000,00 atau 31,98%, dengan capaian 100%.**

Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

**1.1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp41.780.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp13.360.000,00 atau 31,98%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan indikator keberhasilan



Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan alokasi anggaran sebesar Rp41.780.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp13.360.000,00 atau 31,98%. Dengan target 22 dokumen serta realisasi (*output*) 22 dokumen atau 100%.

**4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp635.255.881,00 realisasi keuangan sebesar Rp276.706.910,00 atau 43,56%, dengan capaian 99,33%.** Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut:

**1.1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp412.432.344,00 realisasi keuangan sebesar Rp178.215.000,00 atau 43,21%, dengan capaian 98%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator keberhasilan Jumlah desa siaga aktif mandiri, Jumlah desa yang memanfaatkan alokasi dana minimal 10% untuk UKBM, Jumlah posyandu dengan status posyandu aktif, dan Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp412.432.344,00 realisasi keuangan sebesar Rp178.215.000,00 atau 43,21%. Dengan target masing-masing indikator yakni 4 desa, 90 desa, 714 posyandu, dan 67 dokumen serta realisasi (*output*) masing-masing



indikator yakni 4 desa atau 100%, 90 desa atau 100%, 518 posyandu atau 72,55%, dan 66 dokumen atau 98,51%.

**1.2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp11.621.100,00 realisasi keuangan sebesar Rp10.806.910,00 atau 92,99%, dengan capaian 100 %.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan indikator keberhasilan Jumlah peserta penyuluhan; alokasi anggaran sebesar Rp11.621.100,00 realisasi keuangan sebesar Rp10.806.910,00 atau 92,99%. Dengan target indikator yakni 500 orang serta realisasi (*output*) yakni 500 orang atau 100%.

**1.3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp211.202.437,00 realisasi keuangan sebesar Rp87.685.000,00 atau 41,52%, dengan capaian 100%.**

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan indikator keberhasilan Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan perbaikan, Jumlah Dokumen



Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM, Kelurahan/Lintas Sektor yang mendapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dan Terselenggaranya bimbingan teknis dan supervisi UKBM, alokasi anggaran sebesar Rp211.202.437,00 realisasi keuangan sebesar Rp87.685.000,00 atau 41,52%. Dengan target masing-masing indikator yakni 20 dokumen, 80 dokumen, 16 kelurahan/desa, dan 11 desa serta realisasi (*output*) masing-masing indikator yakni 20 dokumen atau 100%, 80 dokumen atau 100%, 16 kelurahan/desa atau 100%, dan 11 desa atau 100%.



Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Tabel..... berikut :

**Tabel.....**  
**Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Kesehatan**  
**(dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan)**

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)		TARGET (OUTPUT/OUTCOME)		REALISASI (OUTPUT/OUTCOME)			KETERANGAN	
										(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	PERMASALAHAN	UPAYA TINDAKLANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>82.159.445.564,00</b>	<b>79.514.700.366,00</b>	<b>96,78</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
				1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran dengan Rencana Strategis</b>	<b>30.820.000</b>	<b>30.820.000</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
				1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran tersusun tepat waktu	11.500.000	11.500.000	100	4	Dokumen	4	Dokumen	100		
				1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah minimal B	19.320.000	19.320.000	100	1	Dokumen	1	Dokumen	100		
				1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan yang ditangani</b>	<b>73.569.334.521</b>	<b>71.124.896.845</b>	<b>96,68</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		



				1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	73.495.639.196	71.052.175.155	96,68	830	Orang	830	Orang	100		
				1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jenis SPJ UP, GU dan LS tertangani tepat waktu	68.695.325	67.721.690	98,58	12	Jenis	12	Jenis	100		
				1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun tepat waktu	5.000.000	5.000.000	100	25	Laporan	25	Laporan	100		
													-			
				<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>2.663.200</b>	<b>2.520.000</b>	<b>94,62</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
				1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan Rekomendasi Perbaikan	2.663.200	2.520.000	94,62	12	Dokumen	12	Dokumen	100		
						Jumlah Dokumen Pendataan aset dan Inventaris Aset Barang Milik Daerah				25	Dokumen	25	Dokumen	100		
				<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>7.518.568.350</b>	<b>7.403.434.640</b>	<b>98,47</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
				1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang memperoleh penilaian	7.518.568.350	7.403.434.640	98,47	812	Orang	812	Orang	100		





					kinerja dengan kategori baik											
				1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terseleenggaranya pelayanan administrasi umum yang mendukung operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng</b>	<b>514.087.822</b>	<b>477.264.091</b>	<b>92,84</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>		
				1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan saran listrik dan penerangan	6.004.878	4.827.612	80,39	5	jenis	5	Jenis	100		
				1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	291.912.727	281.119.364	96,30	4	jenis	4	Jenis	100		
				1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyelenggaraan Upacara	62.103.250	54.457.000	87,69	47	kali	47	kali	100		
				1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	50.774.208	44.873.065	88,38	47	jenis	47	jenis	100		
				1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat dan Konsultasi	103.292.759	91.987.050	89,05	30	Laporan	30	Laporan	100		
				1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan</b>	<b>288.521.671</b>	<b>242.445.632</b>	<b>84,03</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>		



				1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar tertangani	2.500.000	2.500.000	100	7.500	Lembar	12.801	lembar	100		
				1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan teleponair dan listrik	92.000.000	72.380.768	78,67	36	Rekening	36	rekening	100		
				1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis Bahan/alat kebersihan	194.021.671	167.564.864	86,36	17	Unit	17	Unit	100		
						Jumlah jenis kebutuhan ATK				131	jenis	131	jenis	100		
						Jumlah peralatan kerja dalam kondisi baik				53	unit	53	unit	100		
				<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan</b>	<b>235.450.000</b>	<b>233.319.158</b>	<b>99,09</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
				1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan layak operasi	185.050.000	183.860.158	99,36	30	Unit	30	Unit	100		
				1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	50.400.000	49.459.000	98,13	1	Unit	1	Unit	100		
				<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>185.948.485.228</b>	<b>145.522.261.976,63</b>	<b>78,26</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>91,43</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		



					<b>2.1</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (dinkes)</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar</b>	<b>10.278.095.770</b>	<b>9.307.511.397</b>	<b>90,56</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
					2.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	1.727.618.028	1.409.852.648	81,61	373	unit	373	unit	100		
							Tersedianya alat kesehatan/ alat penunjang medik pelayanan kesehatan dasar				3	unit	3	unit	100		
					2.1.2	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit dengan ketersediaan obat sesuai dengan standar	6.630.428.406	6.252.900.839	94,31	22	Unit	22	Unit	100		
							Jumlah Rumah Sakit Dengan Ketersediaan Obat Sesuai Dengan Standar				2	RS	2	RS	100		
							Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang mendapat distribusi obat tepat waktu dan diterima dalam kondisi baik				22	Fasy anke s	22	Fasy anke s	100		
					2.1.3	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Rumah Sakit Dengan Ketersediaan Bahan Habis Pakai Sesuai	1.681.462.336	1.559.883.010	92,77	2	RS	2	RS	100		



						Dengan Standar										
				2.1.4	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah FKTP memiliki alat kesehatan sesuai standar	238.587.000	84.874.900	35,57	22	paket	22	Paket	100		
				<b>2.2</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan</b>	<b>175.582.281.852</b>	<b>136.134.331.579,63</b>	<b>77,53</b>	<b>85</b>	%	<b>84,40</b>	%	<b>99,29</b>		
				2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan program/kegiatan	3.235.286.449	708.630.000	21,90	20	Dokumen	20	Dokumen	100	Terdapat SILPA BOK Puskesmas. Terdapat anggaran perjadi BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	
						Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani				2.200	Ibu Hamil resti	2.925	Ibu Hamil resti	100		
						Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10.991	Ibu hamil	9.734	Ibu hamil	88,56		



					2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah pelayanan nifas sesuai standar	1.605.629.980	45.750.000	2,85	10.498	ibu nifas	9.963	ibu nifas	94,90	Terdapat belanja makmin dan perjadin untuk pengguna Rumah Tunggu Kelahiran yang tidak dapat terealisasi karena meskipun terdapat kasus rujukan tetapi tidak memanfaatkan RTK karena pasien langsung ke RS tempat rujukan (RSUD Buleleng). Terdapat anggaran perjadin BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup
							jumlah pertolongan persalinan oleh tenakes yang memiliki kompetensi bidan				10.498	Ibu bersalin	10.046	Ibu bersalin	95,69	



						Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9.384	Ibu bersalin	8.672	Ibu bersalin	92,41		
				2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah komplikasi neonatal yang ditangani	1.798.114.437	86.650.000	4,82	1.500	Neonatal	1.113	Neonatal	74,33	Terdapat SILPA BOK Puskesmas. Terdapat anggaran perjadi n BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi				9.998	Bayi	9.982	Bayi	99,84		
						Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9.696	Bayi baru lahir	9.028	Bayi baru lahir	93,11		
				2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	4.197.477.948	714.135.000	17,01	38.552	Balita	40.780	Balita	100	Terdapat SILPA BOK Puskesmas. Terdapat anggaran perjadi n BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	



						Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				38.552	Balita	37.311	Balita	96,78		
				2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah remaja yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1.911.984.708	183.245.000	9,58	109.341	Remaja	105.102	Remaja	96,12	Pelayanan Usia Pendidikan Dasar tidak 100% dikarenakan pada saat pelayanan penjarangan dan berkala ada beberapa anak yang tidak sekolah dan untuk sasaran yang belum terlayani tidak dilaksanakan pelacakan atau kunjungan. Selain itu pendataan usia pendidikan dasar belum optimal yang berpengaruh pada penetapan sasaran.	Mengoptimalkan pelacakan dan kunjungan rumah apabila sasaran belum mendapatkan pelayanan
						Jumlah usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				108.139	orang	88.345	orang	81,70	Terdapat SILPA BOK Puskesmas. Terdapat anggaran perjadi BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi	









				2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan	158.394.460	20.500.000	12,94	8.561	orang	9.180	Orang	100	Terdapat anggaran perjadin BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	
						Jumlah penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5.725	orang	4.566	orang	79,76		
				2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan	353.659.460	47.100.000	13,32	676	orang	715	orang	100	Terdapat anggaran perjadin BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	
						Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				713	orang	733	orang	100		
				2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	272.784.460	41.865.000	15,35	528	Orang	509	Orang	96,40	Capaian layanan belum mencapai 100% dikarenakan belum semua kasus indeks dilakukan	Pembinaan dan pelatihan yang intensif terhadap petugas di puskesmas; Meningkatkan kemitraan melalui penguatan







						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9.374	Orang	9.184	Orang	97,97		
				2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah jenis KLB yang ditangani < dari 18 Jam	909.605.835	76.318.800	8,39	6	Jenis	5	Jenis	83,33	Terdapat anggaran perjadin BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	
									212	Dokumen	116	Dokumen	54,72			
				2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah anak 5-59 bulan mendapat Vitamin A	953.486.000	478.777.105	50,21	38.941	Orang	44.396	Orang	100	Terdapat anggaran perjadin BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	
						Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat makanan pendamping ASI				16	Orang	16	Orang	100		



						Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan				60	Kasus	52	Kasus	86,67		
						Jumlah balita gizi kurang				50	Kasus	598	Kasus	100		
						Jumlah Balita KEP Mendapat Perawatan				88	Balita	410	Balita	100		
						Jumlah Balita usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif				586	Orang	5.073	Orang	100		
						Jumlah bumil KEK ditangani sesuai standar				728	Bumil KEK	479	Bumil KEK	65,80		
						Jumlah bumil mendapat Fe 90 tablet				9.232	Bumil	9.173	Bumil	99,36		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat				206	Dokumen	138	Dokumen	66,99		



				2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kelompok/klub olahraga yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan olahraga sesuai standar	349.456.000	181.210.000	51,85	20	Kelompok	23	Kelompok	100	Terdapat anggaran perjadin BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup
						Jumlah pos UKK yang dibina dan melaksanakan upaya kesehatan kerja sesuai standar				20	Pos UKK	20	Pos UKK	100	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				127	Dokumen	105	Dokumen	82,68	
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai standar				16	Kel/Desa	6	Kel/Desa	37,50	
				2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan mendapat pemicuan pilar 1 STBM	772.832.400	244.915.000	31,69	20	Desa/Kelurahan	20	Desa/Kelurahan	100	Terdapat anggaran perjadin BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup



						Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan				20	Dokumen	20	Dokumen	100		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				324	Dokumen	109	Dokumen	33,64		
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					16	Kel/Desa	6	Kel/Desa	37,50		
				2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan terbaik	594.142.719	295.252.500	49,69	20	kali	20	kali	100	Terdapat anggaran perjadi BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	
						Jumlah model media promosi kesehatan				3	Model	3	Model	100		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				125	Dokumen	86	Dokumen	68,8		





						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				16	Kelurahan/desa	6	Kelurahan/desa	37,50		
				2.2.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	3.250.000	3.250.000	100	20	Dokumen	20	Dokumen	100		
						Jumlah penyehat tradisional yang teregistrasi dan dibina				80	Orang	80	Orang	100		
				2.2.19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah jenis penyelidikan epidemiologi <24 jam bagi desa/kelurahan mengalami KLB	659.669.688	35.365.000	5,36	6	Jenis	5	Jenis	83,33	Terdapat anggaran perjadi BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				195	Dokumen	115	Dokumen	58,97		
						Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan				16	Kelurahan/desa	6	Kelurahan/desa	37,50		
				2.2.21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka toleransi annual parasite inciden (API) < 1	2.126.515.125	605.506.000	28,47	0,01	per 1000 Penduduk	0,01	per 1000 Penduduk	100	Terdapat anggaran perjadi BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak	





						Jumlah kematian akibat malaria				85	kasus	-	kasus	100		
						Jumlah penderita diare yang ditangani				7.071	Kasus	7.232	Kasus	100		
						Jumlah penderita penyakit DBD yang mendapat pelayanan kesehatan				1.005	Orang	875	Orang	87,06		
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan KIE pencegahan dan pengendalian penyakit Menular				20	Pusk	20	Pusk	100		
						Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk				2	per 100.000 Pend	5,3	per 100.000 Pend	(62,78)		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				202	Dokumen	119	Dokumen	58,91		
						Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				16	Kel/desa	6	Kel/desa	37,50		



				2.2.22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta PBI daerah	71.753.732.450	71.703.097.500	99,93	177.335	Peserta	177.335	Peserta	100		
				2.2.23	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen potensial KLB yang dikirim	24.000.000	24.000.000	100	52	Kali	14	Kali	26,92		
				2.2.26	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	2.007.514.445	555.787.260	27,69	20	Puskemas	20	Puskemas	100	Terdapat anggaran untuk kegiatan survei akreditasi yang tidak dapat terlaksana karena belum ditetapkan standar dan instrumen oleh kementerian	Melaksanakan persiapan akreditasi sembari menunggu kebijakan lebih lanjut dengan menyelenggarakan Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
						Jumlah puskesmas terakreditasi minimal madya				20	Puskemas	15	Puskemas	75		
				2.2.27	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah sinyal kewaspadaan yang direspori (Alert SKDR terverifikasi)	10.092.169.600	10.005.079.162	99,14	5.000	Sinyal	2.762	2.762	55,24	Terdapat anggaran perjadi BOK Puskesmas yang tidak direalisasikan karena tidak memenuhi ketentuan perbup	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan kewaspadaan dini dan				122	Dokumen	92	Dokumen	75,41		









				3.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	3.400.000	3.400.000	100	65	orang	43	orang	<b>66,15</b>	Kegiatan UKOM sudah dilaksanakan untuk 43 nakes pada bulan Juni. Pelaksanaan ukom selanjutnya ditunda hingga proses pengajuan akreditasi ukom selesai	Proses pengajuan akreditasi UKOM
				<b>4</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>41.780.000</b>	<b>13.360.000</b>	<b>31,98</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>		
				<b>4.1</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase kegiatan monitoring dan evaluasi</b>	<b>41.780.000</b>	<b>13.360.000</b>	<b>31,98</b>	<b>100</b>	%	<b>80</b>	%	<b>100</b>		
				4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi perbaikan	41.780.000	13.360.000	31,98	22	Dokumen	22	Dokumen	100	Terdapat silpa BOK DAK Non Fisik yang tidak dapat terserap karena baru tersedia pada bulan oktober sementara pelaksanaan monev sarana layanan kefarmasian telah dilakukan di awal tahun menggunakan anggaran induk.	Menggunakan anggaran induk, efisiensi dengan integrasi kegiatan lain
				<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>635.255.881</b>	<b>276.706.910</b>	<b>43,56</b>	<b>100</b>	%	<b>99,33</b>	%	<b>99,33</b>		





					<b>5.1</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase rumah tangga ber-PHBS</b>	<b>412.432.344,00</b>	<b>178.215.000</b>	<b>43,21</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>83,30</b>	<b>%</b>	<b>98,00</b>		
					5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa siaga aktif mandiri	412.432.344,00	178.215.000	43,21	4	Desa	4	Desa	100		
							Jumlah desa yang memanfaatkan alokasi dana minimal 10% untuk UKBM				90	Desa	90	Desa	100		
							Jumlah posyandu dengan status posyandu aktif				714	Posyandu	518	Posyandu	72,55		
							Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat				67	Dokumen	66	Dokumen	98,51		
					<b>5.2</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi</b>	<b>11.621.100</b>	<b>10.806.910</b>	<b>92,99</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
					5.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah peserta penyuluhan	11.621.100	10.806.910	92,99	500	orang	500	orang	100		
					<b>5.3</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat</b>	<b>211.202.437,00</b>	<b>87.685.000,00</b>	<b>41,52</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		



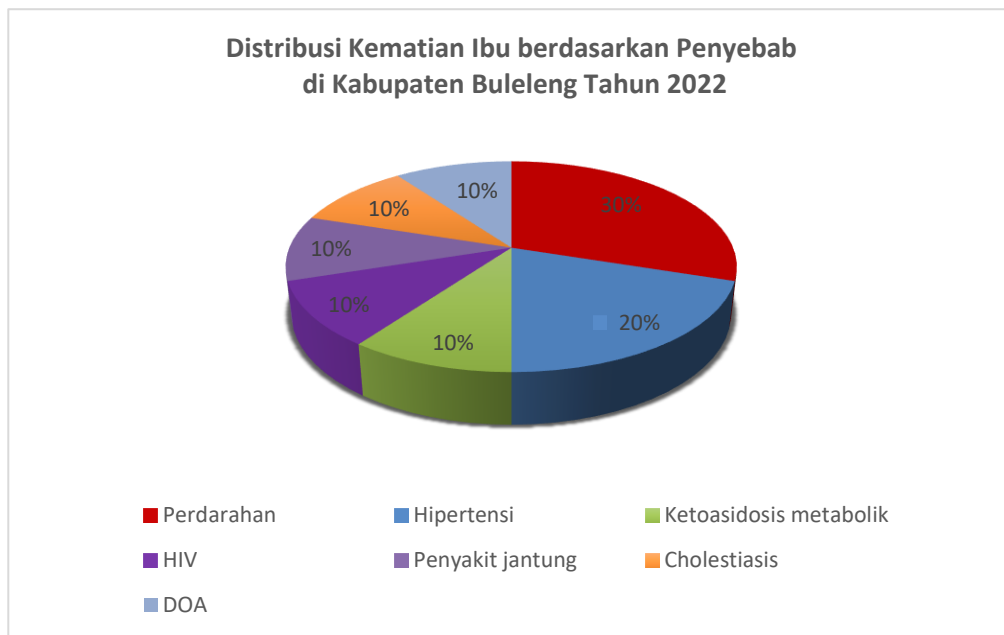
						<b>Daerah Kabupaten/ Kota dilaksana n</b>										
				5.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	211.202.437,00	87.685.000,00	41,52	20	Dokumen	20	Dokumen	100		
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				80	Dokumen	80	Dokumen	100		
						Kelurahan/Lintas Sektor yang mendapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				16	Kelurahan/Desa	16	Kelurahan/Desa	100		
						Terselenggara bimbingan teknis dan supervisi UKBM				11	Desa	11	Desa	100		
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>268.801.376.673</b>	<b>225.343.439.252,63</b>	<b>83,83</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>99,87</b>	<b>%</b>	<b>99,87</b>		



## B. Permasalahan

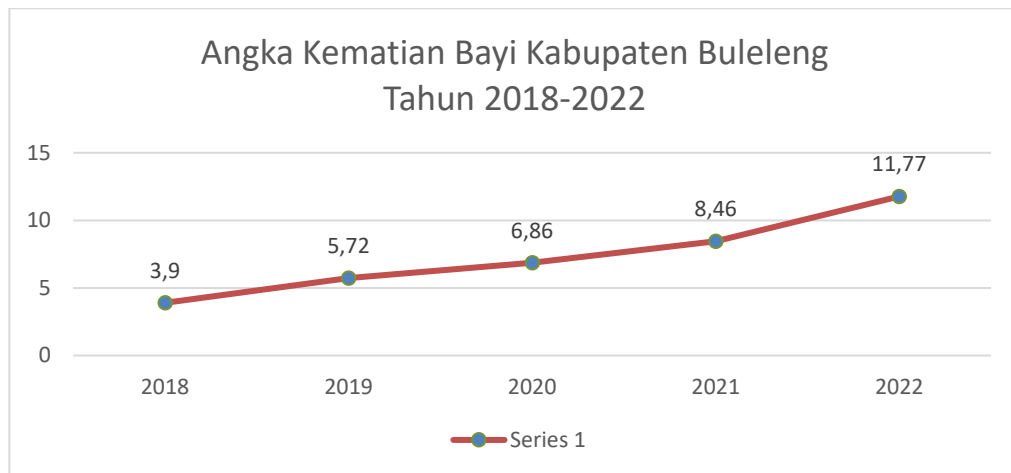
Dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Dalam rangka pencapaian kinerja organisasi tidak terlepas dari potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng beserta jaringannya (Rumah Sakit Tangguwisia, Rumah Sakit Giri Emas, Puskesmas dan Poskesdes) berjumlah 4.272 orang, yang terdiri dari 1441 pegawai PNS dan 2831 pegawai non PNS. Berdasarkan perhitungan analisa jabatan yang telah disusun sebelumnya, masih terjadi ketimpangan jumlah tenaga yang ada dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan di masing-masing substansi maupun sub bagian.
2. Pada tahun 2022 terdapat 10 kematian ibu dari 10.022 kelahiran hidup di Kabupaten Buleleng dengan angka kematian ibu sebesar 99,78 per 100.000 KH. Kematian ibu di Kabupaten Buleleng tahun 2022 sebagian besar terjadi pada masa kehamilan dan persalinan yakni masing-masing 4 kasus, sementara 2 kematian lainnya terjadi pada masa nifas. Adapun penyebab kematian ibu diantaranya 3 perdarahan, 2 hipertensi, 1 gangguan metabolik, 1 cholestiasis, 1 HIV, 1 penyakit jantung, dan 1 DOA (death on arrival). Faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu yakni kegagalan dalam mendeteksi faktor risiko dan penilaian awal layanan kegawatdaruratan, keterlambatan mendapat pelayanan, kegagalan penanganan di tempat rujukan serta perawatan sub-optimal dan tatalaksana tidak sesuai. Distribusi kematian ibu berdasarkan penyebab kematian dapat dilihat dalam grafik berikut.



*Sumber data: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi*

- Pada tahun 2022 terdapat 118 kematian bayi dari 10.022 kelahiran hidup dengan angka kematian bayi sebesar 11,77 per 1000 KH. Angka kematian bayi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya perbaikan pencatatan dan pelaporan melalui pemanfaatan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) oleh seluruh Fasyankes di Kabupaten Buleleng baik di tingkat layanan dasar hingga layanan lanjutan. Pemanfaatan MPDN menyebabkan data kematian bayi yang sebelumnya tidak dilaporkan menjadi dilaporkan secara optimal karena fasyankes dapat langsung mengakses MPDN sehingga alur pelaporan menjadi lebih efisien. Tren angka kematian bayi di Kabupaten Buleleng dalam lima tahun terakhir dapat dilihat grafik berikut.



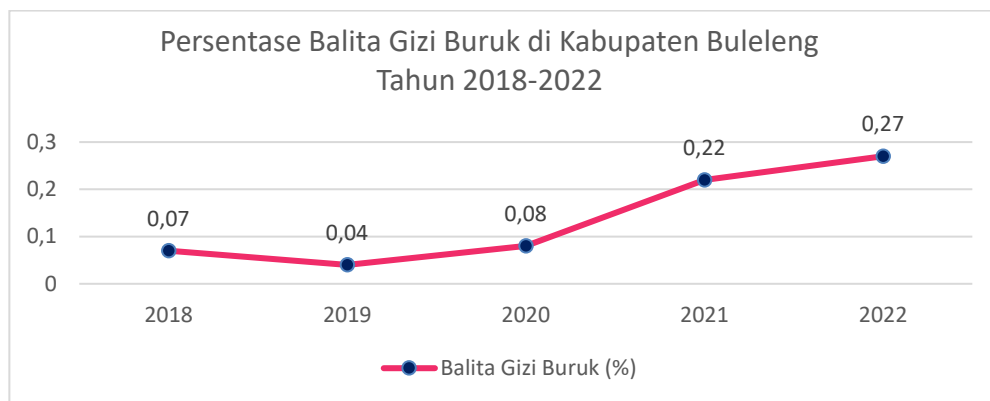
*Sumber data: Substansi Kesehatan*

Setengah dari kasus kematian bayi terjadi pada masa perinatal (0-7 hari) yakni sebanyak 59 kasus (50%), sementara kasus lainnya terjadi pada masa neonatal (8-28 hari) sebanyak 40 kasus (34%), dan post neonatal (29 hari-11 bulan) sebanyak 19 kasus (16%). Adapun penyebab tertinggi kematian bayi usia 0-28 hari yakni BBLR sebanyak 31 kasus (31,31%), kelainan kongenital 27 kasus (27,27%), asfiksia 22 kasus (22,22%). Selain itu terdapat pula kematian bayi 0-28 hari yang disebabkan oleh sebab lain seperti sepsis, gastrochisis, pneumonia, aspirasi, dan DOA. Sementara penyebab tertinggi kematian bayi post neonatal (29 hari-11 bulan) yakni pneumonia sebanyak 10 kasus (52,63%) sementara kasus lainnya disebabkan oleh diare, kelainan kongenital, kejang, dispneu, eodema paru, dan meningitis.

Faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kematian bayi yakni kurang optimalnya kualitas ANC (Antenatal Care) untuk mendeteksi adanya kelainan janin pada periode awal kehamilan serta tindak lanjut yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian bayi akibat kelainan bawaan. Kegagalan dalam penilaian awal dan sistem rujukan, tatalaksana bayi bayi baru lahir yang kurang tepat serta perawatan subotimal khususnya pada kasus asfiksia, pneumonia, dan infeksi juga berkontribusi terhadap kematian bayi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kematian bayi yakni status kesehatan ibu sejak masa sebelum kehamilan, dimana persiapan

kehamilan yang kurang optimal berisiko pada terjadinya BBLR pada bayi yang dilahirkan.

4. Pada tahun 2022 persentase balita gizi buruk di Kabupaten Buleleng sebesar 0,27%, dimana terdapat 69 balita gizi buruk dari 25.960 balita yang diukur BB/TB. Keseluruhan kasus balita gizi buruk telah mendapatkan perawatan. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Buleleng dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat yang dapat dilihat grafik berikut.



Sumber data: Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Peningkatan persentase gizi buruk dari tahun tahun sebelumnya hal tersebut dimungkinkan belum semua sasaran yakni balita dilakukan pengukuran BB/TB, dimana dari total sasaran balita yakni 41.351 hanya 25.960 (62,78%) yang diukur BB/TB. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya kasus gizi buruk diantaranya.

- a. Pola pemberian makan yang kurang tepat terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Praktik pemberian makan pada anak (PMBA) yang dilakukan orangtua belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu belum tepat memperhatikan ukuran, frekuensi, jumlah maupun teksturnya.
- b. Kelahiran prematur dan kondisi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) serta adanya penyakit penyerta maupun kelainan bawaan seperti hidrocefalus, TB Paru, kelainan jantung, cerebral palsy, glaukoma kongenital dan lain sebagainya, juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko gizi buruk pada balita. Pola perawatan dan



praktik pemberian makanan yang kurang tepat disertai kondisi prematur dan BBLR maupun penyakit penyerta menyebabkan status gizi balita dapat dengan mudah menjadi gizi buruk.

- c. Masih kurangnya pengetahuan gizi dan kesadaran masyarakat terkait pola asuh sehingga anak rentan mengalami gizi buruk. Pola asuh yang dimaksud, misalnya pemberian makanan pada bayi umur 0-6 bulan yang seharusnya hanya diberi ASI. Pemberian makanan pada bayi 0-6 bulan dapat meningkatkan risiko infeksi karena sistem pencernaan pada bayi yang belum sempurna, hal tersebut kemudian dapat meningkatkan risiko anak mengalami gizi buruk.
- d. Peran lintas sektor belum optimal dalam hal pencegahan dan penanganan kasus gizi buruk secara terpadu. Masyarakat di beberapa desa masih mengalami kendala dalam hal akses ke posyandu sehingga enggan untuk mencari pelayanan kesehatan balita ke posyandu.

### **C. Upaya Mengatasi Permasalahan**

Upaya-upaya yang dilaksanakan:

1. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, upaya pengadaan pegawai terus diupayakan guna menunjang kinerja dalam melaksanakan program maupun kegiatan kesehatan di Kabupaten Buleleng. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan usulan kebutuhan tenaga kepada organisasi yang berwenang (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng) serta melakukan pengadaan/ perekrutan tenaga kontrak apabila masih memungkinkan secara regulasi dan finansial. Disamping itu dengan adanya perekrutan tenaga dengan perjanjian kerja (P3K) bidang Kesehatan diharapkan dapat memberikan suplai tenaga yang dapat meningkatkan capaian pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
2. Adapun upaya dibidang kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu antara lain :



- a. Review SOP tatalaksana perdarahan pada kehamilan di tempat layanan FKTP maupun FKRTL.
  - b. Pendampingan supervisi fasilitatif ke Pukesmas termasuk ke praktik bidan mandiri terkait sarana maupun kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan ibu.
  - c. Penguatan terhadap penerapan ANC dan skrining faktor risiko dengan pengelompokan sesuai dengan manual rujukan. Hal tersebut ditujukan untuk mendeteksi secara dini adanya risiko kehamilan dan persalinan pada ibu. Selain itu juga dilakukan peninjauan antenatal terpadu sesuai standar serta orientasi asuhan pasca keguguran.
  - d. Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk kegawatdaruratan maternal sesuai dengan kewenangan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
  - e. Peningkatan Mutu layanan RS Tangguwisata dengan pemenuhan SDK dan percepatan menjadi RS mampu PONEK oleh bidang SDK dinkes Kab Buleleng
  - f. Evaluasi aplikasi Maternal Neonatal (SiMatneo) RSUD Kabupaten Buleleng sebagai tempat rujukan untuk kasus gawat darurat maternal neonatal untuk pengadaan lab kultur,incubator transport.
  - g. Penguatan lintas sektor dalam peningkatan Kesehatan reproduksi agar kehamilan sehat dan aman.
  - h. Meningkatkan upaya promosi dan edukasi kesehatan melalui optimalisasi pemanfaatan buku KIA dengan melibatkan suami dan keluarga sehingga dapat mengetahui perawatan kesehatan ibu hamil yang tepat serta dapat mengenali risiko kehamilan untuk mencegah komplikasi.
  - i. Penguatan manajemen program melalui peningkatan pelaksanaan PWS- KIA, penyeliaan fasilitatif dan penyelenggaraan audit maternal dan perinatal.
3. Adapun upaya dibidang kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi antara lain :
- a. Review SOP tatalaksana bayi baru lahir khususnya bayi dengan komplikasi di tempat layanan FKTP maupun FKRTL.





- b. Pendampingan supervisi fasilitatif ke Pukesmas termasuk ke praktik bidan mandiri terkait sarana maupun kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan bayi.
  - c. Penguatan terhadap penerapan ANC dan skrining faktor risiko dengan pengelompokan sesuai dengan manual rujukan. Hal tersebut ditujukan untuk mendeteksi secara dini adanya risiko kelainan pada bayi.
  - d. Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk kegawatdaruratan perinatal sesuai dengan kewenangan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
  - e. Peningkatan Mutu layanan RS Tangguwisia dengan pemenuhan SDK dan percepatan menjadi RS mampu PONEK oleh bidang SDK dinkes Kab Buleleng
  - f. Evaluasi aplikasi Maternal Neonatal (SiMatneo) RSUD Kabupaten Buleleng sebagai tempat rujukan untuk kasus gawat darurat maternal neonatal untuk pengadaan lab kultur, incubator transport.
  - g. Meningkatkan upaya promosi dan edukasi kesehatan melalui optimalisasi pemanfaatan buku KIA yang didistribusikan kepada seluruh sasaran ibu hamil dengan melibatkan suami dan keluarga sehingga dapat mengetahui untuk meningkatkan pemahaman terkait perawatan bayi baru lahir serta deteksi dini faktor risiko yang dapat terjadi pada bayi.
  - h. Penguatan manajemen program melalui peningkatan pelaksanaan PWS- KIA, penyeliaan fasilitatif dan penyelenggaraan audit maternal dan perinatal.
4. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan persentase balita gizi buruk antara lain.
- a. Pemberian makanan tambahan untuk balita gizi kurang dan gizi buruk. Suplementasi gizi yang diberikan berupa makanan tambahan dalam bentuk biskuit dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral. Makanan tambahan yang diberikan dapat berupa MT penyuluhan untuk mencegah terjadinya masalah gizi dan MT Pemulihan yang diberikan untuk



- mengatasi terjadinya masalah gizi dan diberikan selama 90 hari makan.
- b. Orientasi Praktik pemberian makan pada anak (PMBA) pada petugas gizi puskesmas dan kader gizi untuk dapat melaksanakan edukasi dan praktik PMBA bagi keluarga balita.
  - c. Penguatan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam melakukan pencegahan, pelacakan kasus dan penanggulangan masalah gizi buruk dan stunting secara berjenjang di semua level. Hal tersebut dilakukan melalui penggerakan kader gizi dalam melakukan sweeping bagi balita yang tidak datang ke posyandu. Kader tersebut juga berperan dalam melakukan KIE terkait pola asuh, pola makan dan PMBA serta higiene dan sanitasi kepada keluarga balita.

#### **D. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yg sudah ditetapkan dalam PK**

Secara umum kegiatan dan program yang dilaksanakan mampu memberikan daya ungkit pada target kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penentuan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang tertuang dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga setiap program-kegiatan memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan target kinerja.

Dari 5 Program Dinas Kesehatan dimana terdapat 7 kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 3 kegiatan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 3 kegiatan dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 1 kegiatan dalam Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dan 3 kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Kinerja program berperan dalam mencapai indikator kinerja utama sesuai dengan perjanjian kinerja yakni Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi dengan target 95%, Angka Kematian Ibu dengan target 100 per



100.000 KH, Angka Kematian Bayi dengan target 4,8/1000 KH, Persentase Balita Gizi Buruk dengan target 1,3%, dan Angka Usia Harapan Hidup dengan target 71,50 tahun.

### E. Kebijakan Strategis Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)	Pemenuhan hak masyarakat terhadap standar minimal pelayanan kesehatan
2	Pemerataan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional	Menutupi kesenjangan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional	Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan
4	Penekanan Angka Kematian Ibu	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun	Menekan angka kematian ibu hingga berada dibawah 100



		2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)	per 100.000 kelahiran hidup
5	Penurunan Kasus Stunting	Peraturan Bupati Buleleng Nomer 148 tahun 2019 tentang Penanganan Stunting	Menekan persentase stunting pada balita

## F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

### Hasil Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program UHC yang saat ini mengalami hambatan karena 74.000 lebih terblokir Pemerintah Daerah agar segera mendapat penanganan terutama bagi pemegang KIS masyarakat miskin	Dinas Kesehatan hanya berwenang dalam pembayaran iuran PBI APBD sesuai dengan data kepesertaan aktif yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Dalam hal kendala kartu kepesertaan tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan untuk akses pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan dan UPTD dibawahnya	Kartu kepesertaan JKN khususnya PBI APBD yang tidak aktif sehingga menghambat tercapainya program UHC.



		telah melakukan upaya koordinasi dengan pihak yang berperan dalam penetapan jumlah peserta PBI Pemda yakni Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan Disdukcapil. Berdasarkan data dari sistem BPJS per Desember 2022 capaian UHC Buleleng yakni 95,68%, dimana kepesertaan APBD mencapai 230.855 peserta (29,15%).	
2	Validasi data KIS, hendanya dilakukan dengan obyektif karena banyak kepesertaan doble, pekerjaan wiraswasta dapat KIS, peserta yang sudah meninggal, pindah domisili, dan masyarakat yang sudah mampu ekonominya juga mendapat KIS. Hal ini mengakibatkan premi yang dibayarkan oleh Pemerintah daerah mubasir, sehingga program UHC agar ditinjau	Validasi data JKN KIS dilakukan atas koordinasi antara Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan Disdukcapil. Sementara Dinas Kesehatan hanya berwenang dalam pembayaran iuran BPJS berdasarkan data kepesertaan aktif yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial.	Mendukung terwujudnya UCH
3	Penyebab terblokirnya KIS, harus disosialisasikan kepada masyarakat.	Sosialisasi maupun pemberian informasi telah dilakukan oleh penyedia fasilitas pelayanan kesehatan terhadap peserta dengan kartu JKN yang tidak aktif bahwa kepesertaan JKN PBI didaftarkan berdasarkan validasi data dari dinsos, disdukcapil dan bpjs.	Kartu kepesertaan JKN khususnya PBI APBD yang tidak aktif sehingga menghambat tercapainya program UHC.
4	Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang terblokir KIS nya, semestinya mendapat	Dinas Kesehatan hanya berwenang dalam pembayaran iuran PBI APBD sesuai dengan data	Kartu kepesertaan JKN APBD tidak aktif sehingga biaya akses layanan Kesehatan



	<p>perhatian dari Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat yang terblokir KIS nya mengakibatkan bertambahnya piutang pada rumah sakit.</p>	<p>kepesertaan aktif yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Dalam hal kendala kartu kepesertaan tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan untuk akses pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan dan UPTD dibawahnya telah melakukan upaya koordinasi dengan pihak yang berperan dalam penetapan jumlah peserta PBI Pemda yakni Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan Disdukcapil</p>	<p>dibebankan pada rumah sakit</p>
5	<p>Meningkatkan status rumah sakit pratama menjadi tipe C untuk memperluas jangkauan pelayananin kesehatan terhadap masyarakat sehingga masyakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan KIS bisa dirujuk ke rumah sakit kita dan dapat menambah pendapatan pada rumah sakit yang bersangkutan</p>	<p>Dalam peningkatan tipe rumah sakit menjadi tipe C diperlukan anggaran dalam pengadaan sarana maupun prasarana dan SDM. Dinkes sejauh ini telah mengupayakan pengadaan SDM (dokter spesialis) dan sarana prasarana penunjang sesuai dengan kriteria rumah sakit Tipe C yang ditetapkan peraturan yakni PP no 47 Tahun 2021.</p>	<p>Meningkatkan tipe rumah sakit untuk meningkatkan akses layanan kesehatan</p>
6	<p>Memastikan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan secara cepat dan optimal.</p>	<p>Pelayanan Kesehatan ibu hamil menjadi upaya prioritas karena termasuk salah satu indikator pelayanan minimal dasar bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil diberikan sesuai standar permenkes</p>	<p>Meningkatkan pelayanan ibu hamil untuk penurunan angka kematian ibu</p>



		yakni K4, dimana pada tahun 2022 capaiannya yakni 86.91% dari estimasi sasaran tahun tersebut.	
7	Untuk menyiapkan SDM berkualitas, pencegahan dan penanganan stunting harus mendapat prioritas.	Dalam upaya penurunan kasus stunting Dinas kesehatan berkoordinasi dengan <i>leading sector</i> yakni DPPKBP3A. Adapun upaya yang telah dilakukan terkait pencegahan dan penanganan stunting di antaranya sosialisasi untuk meningkatkan cakupan kunjungan balita ke posyandu, serta melakukan upaya preventif berupa pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan calon pengantin anemia, pemberian PMT bagi calon pengantin gizi kurang dan Bumil KEK (kurang energi protein) dengan harapan agar dapat melahirkan anak yang sehat, serta melakukan pencegahan dan penanganan penyakit infeksi pada anak.	Penurunan kasus stunting



		Selain itu Dinkes juga melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas kader dalam penanganan stunting.	
--	--	---	--

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng



**Dr. Saointo, S.Ked., M.A.P.**  
NIP. 197001162003121005